

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Daniri, 2005, *Good Governed Company Panduan Praktis Bagi BUMN untuk menjadi G2C dan Pengelolaannya Berdasarkan Suara Hati*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, 2021, *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, Sleman: Deepublish.
- Amir Ilyas dan Muh Nursal, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana.
- AR Hidayat, 2016, *Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII.
- Bagir Manan, 1990, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudali Mukhti, 2023, *Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mas Rahmah, 2013, *Kewajiban Divestasi Saham Bagi Investor Asing di Sektor Pertambangan*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rudi Toba dan Erwin, 2023, *Memulai Operasi Penambangan Di Indonesia*, Sleman: Deepublish Digital.
- Salim HS, 2010, *Hukum Divestasi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aitya Bakti.

Selfianus dan Ahmad, 2024, *Teori – Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang – Undangan di Bawah Undang – Undang*. Jakarta: Prenamedia.

Soenobo Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wahyu Nugroho, 2022, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Damera Press.

JURNAL

Agus Umar dan Hijriani, 2021, *Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang*, Delegalata Jurnal Ilmu Huku, Volume 6.

Andi Nurul Isma, Yogie Wirdaningsi, 2017, *Analisis Reklamasi Tambang Batukapur di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Geominie, Volume 5.

Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, 2020, *Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK*, National Conference on Law Studies, Volume 2.

Ariadno M.K.A, 2019, *Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 29 Nomor 2.

Daniel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Volume 5 Nomor 4.

Eka Merdekawati Djafar, 2014, *Sinergi Pelaksanaan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3.

- Friskilia, Djentje dan Sarah, 2022, *Efektivitas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Ejournal Unsrat.
- Gumilang, Basthotan, dan Sherly,Tari, 2022, *AnalisisUndang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*. *Rewang Rencang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3 Nomor 1.
- Oinisia Meichelin, 2019, *Pengawasan DLH Terhadap Kegiatan Pertambangan Bauksit Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sanggau*, Jurnal Hukum.
- Pardede, 2018, *Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara*, Jurnal Penelitian Hukum.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia Yuridika, Nomor 5.
- Priscilla, Ronny, dan Marthin, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Volume 12.
- Satmaidi. E, 2019, *Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 24 Nomor 20.
- Silalahi. D, 2019, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Seminar dan Lokal Karya Pembangunan Hukum.
- Sonjaya. T, dkk, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan*, Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 5 Nomor 2.
- Tuti Widyaningrum dan Muhammad Rifqi Hamidi, 2024, *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*, IBLAM LAW REVIEW, Volume 4.
- Warlina. L, 2019, *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1.

Zulfahmi, 2023, *Keadilan dan Kepastiam Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 6.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 mengatur tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2012 Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Pertambangan Batuan yang Bersifat Temporer.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Rakyat.

WEBSITE :

"PT Vale Receives IUPK 2024," <https://vale.com/documents/d/guest/2024-5-15-pt-vale-receives-iupk-2024-bahasa>.

Edwia Putri. 2019. *Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara*, Universitas Sriwijaya, diakses 28 Januari 2025, <https://www.unsri.ac.id/perizinan-hukum>.

<https://vale.com/in/indonesia/esg/reklamasi-pascatambang>

<https://vale.com/in/indonesia/sejarah-vale-di-indonesia>

<https://vale.com/in/indonesia/tentang-pt-vale>

<https://www.hukumku.id/post/hukum-lingkungan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata>

PT Vale Indonesia Tbk. (2024, Mei 15). *PT Vale receives IUPK 2024*. Vale. <https://vale.com/documents/d/guest/2024-5-15-pt-vale-receives-iupk-2024-bahasa>.

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas", terdapat dalam <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas> Diakses pada 20 Juli 2025.